

## ABSTRAK

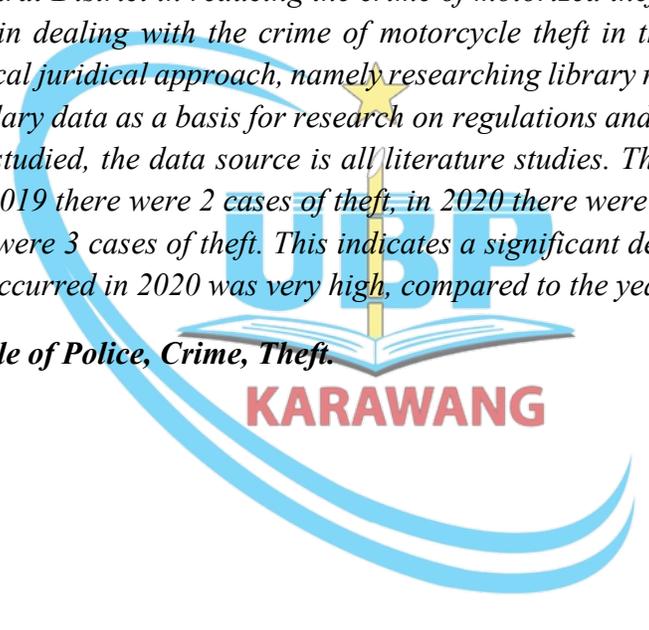
Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, Identifikasi masalah ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Barat dalam mengurangi tindak pidana pencurian bermotor dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat. Adapun Tujuan dari identifikasi masalah tersebut yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Barat dalam mengurangi tindak pidana pencurian bermotor dan untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian motor di Kepolisian Sektor Telukjambe Barat. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti bahan pustaka segala sesuatu yang tertulis/data sekunder sebagai dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber datanya segala studi kepustakaan. Hasil Penulis adalah kejahatan curanmor yang terjadi di wilayah Teluk Jambe Barat terus mengalami perubahan. Pada tahun 2019 tercatat terjadi 2 kasus curanmor, pada tahun 2020 tercatat terjadi 6 kasus curanmor, dan pada tahun 2021 tercatat terjadi 3 kasus curanmor. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Curanmor yang terjadi pada tahun 2020 jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan setelahnya

**Kata kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian.**

## ABSTRACT

*Indonesia is a State of Law, this is confirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph 3 which reads "The State of Indonesia is a State of Law". Based on the Constitution, the identification of this problem is how the role of the police in maintaining security and public order in Telukjambe Barat District in reducing the crime of motor theft is related to Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and how the Police's efforts in handling the crime of motorcycle theft in the West Telukjambe Police. The purpose of identifying the problem is to determine the role of the police in maintaining security and public order in the Telukjambe Barat District in reducing the crime of motorized theft and to find out the police efforts in dealing with the crime of motorcycle theft in the West Telukjambe Police. empirical juridical approach, namely researching library materials, everything written/secondary data as a basis for research on regulations and literature related to the problems studied, the data source is all literature studies. The West is constantly changing. In 2019 there were 2 cases of theft, in 2020 there were 6 cases of theft, and in 2021 there were 3 cases of theft. This indicates a significant decrease. The number of thefts that occurred in 2020 was very high, compared to the years before and after*

**Keywords: Role of Police, Crime, Theft.**



UNIKARAWANG  
KARAWANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan - rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal dengan judul ***“PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”***

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan.

Selama proses penyusunan proposal ini saya mendapatkan banyak bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penyusunan proposal ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tersebut. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada.

1. Dr. H. Dedi Mulyadi SE,.MM Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. M. Gary Gagarin Akbar,.SH,.MH. Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

3. Dr.Anwar Hidayat, SH., MH Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran, nasehat, arahnya yang sangat berguna serta meluangkan waktunya bagi kelancaran penulis skripsi ini.
4. Abdul Kholiq, SH., MH Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan kritik, saran, nasehat, dan arahnya yang sangat berguna serta meluangkan waktunya bagi kelancaran penulis skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, yang selalu mendoakan memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk sahabat-sahabat dan keluarga besar Hukum yang telah memberikan motivasi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima Kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Karawang, 02 Juli 2022

Kiki Yulia

NIM : 16416274201076